

## ABSTRAK

Muhammad Mu'izzurrafi', 12103183020, Pengawasan Inspektorat Terhadap Pemerintah Kabupaten Jombang (Studi Kasus di Inspektorat Kabupaten Jombang), Program Studi Hukum Tata Negara, FASIH UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2023, Pembimbing Yusron Munawir, S.H.I, M.H.

**Kata kunci: pengawasan inspektorat, problem, pemerintah daerah**

Penelitian ini membahas masalah pengawasan Inspektorat terhadap pemerintah kabupaten Jombang dan juga mengenai problem yang dihadapi oleh lembaga Inspektorat Kabupaten Jombang serta solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus korupsi yang pernah menjerat bupati Jombang pada tahun 2018, yang kemudian peneliti memiliki pertanyaan apakah pada wilayah hukum Kabupaten Jombang ada lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan ternyata peneliti menemukan lembaga Inspektorat Kabupaten Jombang ini. Kemudian pada tugas dan fungsi pokok dari Inspektorat khususnya Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial ditemukan adanya 3 poin yang saling berkaitan satu sama lain dalam hal pengawasan terhadap pemerintah daerah. Ketiga poin tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Jombang No. 63 Tahun 2020 pasal 13 ayat 2 poin a, b, dan m. Dimana poin a menunjukkan tugasnya sebagai pelaksana pengawasan, poin b menunjukkan tugasnya sebagai pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi dan poin m menunjukkan tugasnya sebagai perumus kebijakan teknis pengawasan.

Penelitian ini berbasis penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada data-data yang ditemukan di lapangan secara langsung. metode ini digunakan untuk menggali informasi sebagai bahan penelitian yang sumbernya didapatkan melalui perilaku verbal manusia ataupun kejadian nyata yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan oleh peneliti pada saat observasi.

Adapun penelitian ini berfokus pada rumusan masalah pada penelitian ini, pertama yakni berkaitan dengan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang No. 63 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (2) poin a,b dan m telah dilaksanakan secara optimal atau belum. Kedua mengenai problem yang menghambat jalannya proses pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Dan yang ketiga, terkait pandangan fikih siyasah mengenai pengawasan terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa: 1). Inspektorat Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasannya telah dilaksanakan dengan cukup optimal karena telah mendapatkan penilaian kapabilitas APIP level 3 (*Integrated*) dan juga karena masih ditemukan adanya kekurangan yakni belum dapat melaksanakan tugas pengawasan secara menyeluruh, karena dalam pelaksanaan pengawasannya masih didapati adanya instansi pemerintahan yang belum dilakukan pengawasan selama 2 (dua) tahun berturut-turut. 2). Problem yang biasanya ditemukan oleh Inspektorat khususnya Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial adalah berupa kendala administrasi dan juga sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa. Dimana data yang diberikan oleh objek pengawasan kurang lengkap sehingga harus diberikan waktu tambahan untuk menyiapkan segala macam data yang diminta oleh Inspektorat yang akhirnya memperlambat jalannya proses pemeriksaan. Dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa sendiri memiliki kompetensi yang kurang dalam melaksanakan tugasnya juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Inspektorat. Selain itu, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Inspektorat sendiri juga menjadi suatu kendala bagi Inspektorat karena dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat saat ini belum dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh. Sebelum tahun 2020, Inspektorat Kabupaten Jombang juga memiliki problem yang cukup penting dikarenakan dalam peraturan mengenai fungsi dari Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial mengalami tumpang tindih. Namun problem tersebut telah diselesaikan pada tahun 2020 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Jombang No. 63 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang. 3). Dalam persepektif fikih siyasah, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang ini termasuk dalam konsep hisbah yang dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu memerintahkan berbuat kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan melarang kemungkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemungkaran itu dikerjakan. Ditinjau dari Al-Qur'an adanya lembaga Inspektorat ini selaras dengan maksud QS. Ali Imron ayat 104 yang artinya berbunyi : Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Yang dimaksud sebagai segolongan umat itulah disamakan dengan lembaga Inspektorat Kabupaten Jombang.

## ABSTRACT

Muhammad Mu'izzurafi', 12103183020, Oversight of the Inspectorate of the Jombang Regency Government (Case Study in Inspectorate of Jombang Regency), Constitutional Law Study Program, FASIH UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2023, Advisor Yusron Munawir, S.H.I, M.H.

**Keywords: inspectorate supervision, problems, local government**

This study discusses the problems of the Inspectorate's supervision of the Jombang district government and also the problems faced by the Jombang District Inspectorate and the solutions to these problems. This research was motivated by the existence of a corruption case that had ensnared the Jombang regent in 2018, which then the researcher had a question whether in the jurisdiction of Jombang Regency there was an institution tasked with supervising the course of government affairs carried out by the regional government, and it turned out that researchers found the Jombang Regency Inspectorate institution this. Then in the main duties and functions of the Inspectorate, especially the Assistant Inspector for Governance, Economy and Social Welfare, it was found that there were 3 points that were interrelated with each other in terms of supervising local governments. These three points are listed in Jombang Regent Regulation No. 63 of 2020 article 13 paragraph 2 points a, b, and m. Where point a denotes his duties as executor of supervision, point b denotes his duties as a guardian of the implementation of bureaucratic reforms and point m denotes his duties as formulator of supervisory technical policies.

This research is based on qualitative research. Researchers use empirical legal research methods using a qualitative approach. Qualitative research method is a research method based on data found in the field directly. This method is used to dig up information as research material whose source is obtained through human verbal behavior or real events that occur in the field based on empirical facts found by researchers during observations.

This research focuses on the formulation of the problem in this study, first which is related to whether the implementation of the duties and functions of the Assistant Inspector for Governance, Economics and Social Welfare as stated in the Jombang Regent Regulation No. 63 of 2020 Article 13 paragraph (2) points a, b and m have been implemented optimally or not. The second concerns problems that impede the supervision process carried out by the Assistant Inspector for Governance, Economy and Social Welfare of the Regional Government of Jombang Regency. And third, related to the views of *siyasa fiqh* regarding supervision of local government. This study uses empirical legal research with a qualitative approach method. As for the data collection techniques by means of observation, interviews, and also documentation.

The results of this study can be seen that in carrying out its main tasks and supervisory functions: 1.) The Jombang District Inspectorate carries out its main tasks and supervisory functions optimally but there are still deficiencies that have not been able to carry out it as a whole. 2.) Then regarding the problems faced by

the Inspectorate, especially the Assistant Inspector for Governance, Economics and Social Welfare. The problems that are usually found are in the form of administrative constraints as well as human resources owned by the village. Where the data provided by the object of supervision is felt to be incomplete so that additional time must be given to prepare all kinds of data requested by the Inspectorate which ultimately slows down the inspection process. Furthermore, from the human resources owned by the village, which lack competence in carrying out their duties, this is also one of the obstacles faced by the Inspectorate. Apart from that, the human resources owned by the Inspectorate itself are also an obstacle for the Inspectorate because with the number of human resources currently owned by the Inspectorate, they cannot carry out overall supervision. Then before 2020 the Jombang Regency Inspectorate also had quite an important problem because the regulations regarding the functions of the Assistant Inspector for Governance, Economy and Social Welfare experienced overlapping. However, this problem was resolved in 2020 with the issuance of Jombang Regent Regulation No. 63 of 2020. 3.) Then, when viewed from the point of view of *siyasa fiqh*, the supervision carried out by the Jombang Regency Inspectorate is included in the concept of *hisbah* put forward by Al-Mawardi which reads (commands to do good if the good turns out to be not done, and forbids evil if there is a sign -a sign that the *munkar* was committed) and when viewed from the Al-Qur'an the existence of an Inspectorate institution is in line with the intent of QS. Ali Imron verse 104 which means: And let there be a group of people among you who call for virtue, order those who are good and prevent those who are evil, they are the lucky ones. What is meant by a group of people is equated with the Jombang Regency Inspectorate institution.

## نبذة مختصرة

محمد معزرفع ٢٠٢٠/٣١٨٣٠١٢١، إشكالية إشراف مفتشية حكومة جومبانج ريجنسي (تحليل لائحة جومبانج ريجنسي رقم ٦٣ لعام ٢٠٢٠ المادة ١٣، برنامج دراسة القانون الدستوري، كلية الشريعة والعلوم الشرعية جامعة الدولة الإسلامية سيد علي رحمة الله تولونغونغ ٢٠٢٣، المشرف يسرون مناور، بكالوريوس الشريعة الإسلامية، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: إشراف المفتشية، المشاكل، الحكم المحلي

تناقش هذه الدراسة مشاكل إشراف المفتشية على حكومة منطقة جومبانج وكذلك المشاكل التي تواجهها مفتشية منطقة جومبانج والحلول لهذه المشاكل. كان الدافع وراء هذا البحث هو وجود قضية فساد وقعت في شرك الوصي جومبانج في عا. ٢٠١٨، والتي تساءل الباحث بعد ذلك عما إذا كان هناك في ولاية جومبانج ريجنسي مؤسسة مكلفة بالإشراف على مسار الشؤون الحكومية التي يقوم بها حكومة إقليمية، واتضح أن الباحثين وجدوا أن مؤسسة مفتشية جومبانج ريجنسي هذه. ثم في المهام والمهام الرئيسية للمفتشية، ولا سيما مساعد المفتش للحكومة والاقتصاد والرعاية الاجتماعية، وجد أن هناك ثلاث نقاط مترابطة فيما بينها من حيث الإشراف على الحكومات المحلية. هذه النقاط الثلاث مدرجة في لائحة مفتشية جومبانج ريجنسي رقم ٦٣ لعام ٢٠٢٠، المادة ١٣، الفقر ٢، النقاط أ، ب، م. عندما تشير النقطة أ إلى واجباته كمنفذ للإشراف، فإن النقطة ب تشير إلى واجباته كوصي على تنفيذ الإصلاحات البيروقراطية والنقطة م تشير إلى واجباته كمصوغ للسياسات الفنية الإشرافية. يعتمد هذا البحث على البحث النوعي. يستخدم الباحثون طرق البحث القانوني التجريبية باستخدام نهج نوعي. طريقة البحث النوعي هي طريقة بحث تعتمد على البيانات الموجودة في المجال مباشرة. تستخدم هذه الطريقة لاستخراج المعلومات كمواد بحثية يتم الحصول على مصدرها من خلال السلوك اللفظي البشري أو الأحداث الحقيقية التي تحدث في المجال بناءً على الحقائق التجريبية التي وجدها الباحثون أثناء الملاحظات.

يركز هذا البحث على صياغة المشكلة في هذه الدراسة، والتي تتعلق أولاً بما إذا كان تنفيذ واجبات ووظائف مساعد المفتش للحكومة والاقتصاد والرعاية الاجتماعية كما هو مذكور في لائحة جومبانج ريجنسي رقم ٦٣ لعام ٢٠٢٠ المادة تم تنفيذ ١٣ الفقرة ٢) النقاط أ، ب، م على النحو الأمثل أم لا. والثاني يتعلق بالمشاكل التي تعيق عملية الإشراف التي يقوم بها مساعد المفتش لشؤون الحكم والاقتصاد والرعاية الاجتماعية في حكومة منطقة جومبانج ريجنسي. وثالثاً، يتعلق بأراء السياسة الفقهية في الإشراف على الحكم المحلي. تستخدم هذه الدراسة البحث القانوني التجريبي بأسلوب نهج نوعي. أما بالنسبة لتقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق.

يمكن ملاحظة نتائج هذه الدراسة أنه في تنفيذ مهامها الرئيسية ووظائفها الإشرافية (١). تقوم مفتشية منطقة جومبانج بتنفيذ مهامها الرئيسية ووظائفها الإشرافية على النحو الأمثل ولكن لا تزال هناك أوجه قصور لم تتمكن من تنفيذها ككل (٢). ثم فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجهها هيئة التفتيش ولا سيما المفتش المساعد للحكومة والاقتصاد والرعاية الاجتماعية. المشاكل التي توجد عادة في شكل قيود إدارية وكذلك الموارد البشرية التي تملكها القرية. عندما يكون هناك شعور بأن البيانات التي يقدمها موضوع الإشراف غير مكتملة، لذلك يجب إعطاء وقت إضافي لإعداد جميع أنواع البيانات التي تطلبها هيئة التفتيش والتي تؤدي في النهاية إلى إبطاء عملية التفتيش. علاوة على ذلك، من الموارد البشرية التي تملكها القرية، التي تفتقر إلى الكفاءة في أداء واجباتها، فهذه هي أيضاً إحدى العقبات التي تواجه المفتشية. بصرف النظر عن ذلك، فإن الموارد البشرية التي تملكها هيئة التفتيش نفسها تشكل أيضاً عقبة أمام المفتشية لأنه نظراً لعدد الموارد البشرية التي تملكها حالياً المفتشية، لا يمكنها القيام بالإشراف العام. ثم قبل عام ٢٠٢٠، واجهت مفتشية جومبانج ريجنسي أيضاً مشكلة مهمة لأن اللوائح المتعلقة بوظائف مساعد المفتش للحكومة والاقتصاد والرعاية الاجتماعية شهدت تداخلاً. ومع ذلك، تم حل هذه المشكلة في عام ٢٠٢٠ بإصدار

لائحة الوصي غير المتزوج جومبانج رقم ٦٣ لعام ٢٠٢٠ . ٥ ) ثم ، عند النظر إليها من وجهة نظر سياسة الفقه ، تم تضمين الإشراف الذي تقوم به مفتشية جومبانج ريجنسي في مفهوم الحسبة الذي طرحه الماوردي الذي يقرأ ( أوامر لفعل الخير إذا تبين أن الخير لا يتم ، وتحريم الشر إذا كانت هناك إشارة - علامة أن المنكر قد ارتكب) وعندما يُنظر إليه من القرآن ، فإن وجود مؤسسة تفتيشية يتماشى مع مقصد SQ. علي إمرؤن الآية ١٠٤ ومعناه: وليكن بينكم جماعة من الناس تدعو إلى الفضيلة ، وتأمر بالخير ، وتجنب الشر ، فهم المحظوظون. ما تعنيه مجموعة من الأشخاص يعادل مؤسسة مفتشية منطقة جومبانج. وجود مؤسسة تفتيشية يتماشى مع مقصد SQ. علي إمرؤن الآية ١٠٤ ومعناه: وليكن بينكم جماعة من الناس تدعو إلى الفضيلة ، وتأمر بالخير ، وتجنب الشر ، فهم المحظوظون. وجود مؤسسة تفتيشية يتماشى مع مقصد SQ. علي إمرؤن الآية ١٠٤ ومعناه: وليكن بينكم جماعة من الناس تدعو إلى الفضيلة ، وتأمر بالخير ، وتجنب الشر ، فهم المحظوظون. ما تعنيه مجموعة من الأشخاص يعادل مؤسسة مفتشية منطقة جومبانج.